

Kritik Jurnalisme Bencana

Muzayin Nazaruddin
Staf Pengajar Ilmu Komunikasi UII

Artikel ini pernah dimuat di Harian Bernas Jogja, 19 April 2007

Dalam dua buah artikel terdahulu, kolega penulis telah membahas relasi media dan bencana. Anang Hermawan dalam artikelnya berjudul *Agenda Baru Jurnalisme Bencana* (Bernas Jogja, 22 Februari 2007) menegaskan pentingnya jurnalisme investigatif dalam meliput bencana, terutama dalam fase paskabencana. Artikel Masduki dengan judul *Media, Bencana dan Kemiskinan Struktural* (Bernas Jogja, 1 Maret 2007) menyimpulkan perlunya analisis sosial kontemporer bagi wartawan agar mampu menyajikan berita-berita bencana secara lebih mendalam.

Lembaga ini – Pusat Kajian Media dan Komunikasi (Pusmekom) Prodi Ilmu Komunikasi UII – menaruh perhatian besar dalam masalah tersebut. Karena itu, sebagai pendalaman atas artikel-artikel terdahulu, penulis akan kembali membahas tema ini dalam dua buah artikel. Sebagai artikel pertama, tulisan ini membahas urgensi dan kritik atas praktik jurnalisme bencana yang telah dilakukan media-media di Indonesia. Artikel kedua, dalam judul berbeda, akan membahas fase-fase dan prinsip-prinsip normatif jurnalisme bencana sebagai tawaran solutif dari penulis.

Urgensi Jurnalisme Bencana

Jurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana (Hermawan, Bernas Jogja, 22 Februari 2007; Amirudin, *Suara Merdeka*, 26 April 2006). Dalam kata '*bagaimana memberitakan*' terkandung dua dimensi: proses dan hasil. Dimensi proses mengacu pada proses produksi berita-berita bencana, dimensi hasil mengacu pada berita-berita bencana yang dimuat atau disiarkan media.

Lalu, mengapa jurnalisme bencana ini penting? *Pertama*, Indonesia adalah negeri rentan bencana, baik karena kondisi alamnya maupun perilaku masyarakatnya. Kepulauan Indonesia termasuk dalam wilayah Deretan Gunung Berapi Pasifik. Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda, Gerakan Sistem Pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sirkum Australia (www.walhi.or.id/kampanye/bencana). Jelas, kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi. Kondisi alam ini diperparah oleh perilaku masyarakat yang rakus mengeksploitasi sumber daya alam, tanpa memperhatikan aspek-aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan.

Kedua, masyarakat Indonesia – juga dunia – mengetahui berbagai peristiwa bencana melalui media massa. Sebagai peristiwa historis yang sangat membekas secara psikologis dan sosial, masyarakat selalu ingin tahu berbagai hal mengenai bencana yang terjadi. Dalam situasi ketidakpastian yang ditimbulkan bencana, kebutuhan masyarakat akan berita-berita bencana akan meningkat tajam. Masyarakat memuaskan rasa ingin tahunya dengan mengkonsumsi berbagai media yang ada (Rahayu, Polysemia, Juli 2006). Dalam kondisi ini, informasi bencana yang disampaikan media massa akan menjadi *the first, the most important*, bahkan kadang *the only one information* yang akan membentuk pengetahuan masyarakat tentang bencana.

Praktik dan Kritik

Dalam setiap bencana, media memegang kuasa sangat besar karena masyarakat menggantungkan sumber informasi tentang bencana dari media. Tentunya, kuasa besar ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh media untuk melakukan edukasi bencana kepada publik.

Sayang, potensi kuasa yang besar tersebut kurang dimanfaatkan oleh media di Indonesia. Media-media di Indonesia menunjukkan euforia saat memberitakan bencana. Sebagian besar media hanya mengeksploitasi bencana sebagai '*kisah satir yang menghibur*', demi kepentingan akumulasi modal semata. Dalam kacamata bisnis media, bencana adalah '*bad news but good news*', sumber informasi yang tidak pernah kering dengan kandungan nilai berita tinggi.

Hingga saat ini, belum ada kajian yang lengkap dan sistematis tentang praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Namun, sebagai sebuah tulisan pengantar, penulis mengajukan beberapa kritik utama terhadap praktik jurnalisme bencana oleh media-media Indonesia.

Pertama, fungsi ganda media dalam bencana, fungsi jurnalistik sebagai penyebar informasi dan fungsi sosial karitatif sebagai lembaga pengumpul dan penyalur bantuan bencana (Masduki, UNISIA, 2007). Ternyata, media lebih antusias berperan sebagai lembaga pengumpul dan penyalur bantuan bencana daripada berkonsentrasi pada peran jurnalistiknya dalam bencana. Seolah-olah media yang paling berjasa adalah yang berhasil mengumpulkan nominal sumbangan tertinggi. Peran sosial karitatif ini kontradiktif dan menghambat fungsi jurnalistik media sebagai *watchdog* atau lembaga kontrol dalam penyaluran berbagai bantuan bencana. Logikanya, bagaimana mungkin media melakukan kontrol atas penyaluran bantuan bencana jika media itu sendiri terlibat sebagai lembaga penyalur bencana.

Kedua, ambivalensi fungsi media, terutama televisi. Media menjalankan liputan dukacita bencana, pada saat bersamaan juga menjalankan liputan sukacita yang menunjukkan ketiadaan empati (Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006). Hampir semua stasiun televisi tetap menyiarkan gebyar pesta tahun baru 2005 pada saat bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara baru saja menyentak dan meminta ratusan ribu korban. Televisi terus saja membombardir khalayak dengan gegap gempita Piala Dunia 2006, sementara korban gempa Yogyakarta masih hidup darurat di tenda-tenda pengungsian.

Menyangkut konsistensi pemberitaan, kritik terpenting adalah tidak adanya kesinambungan dalam pemberitaan bencana, yang ada adalah berita yang terpenggal-penggal, tidak tuntas, tidak mendalam dan absurd. Berita-berita bencana tersebut tidak memiliki visi dan orientasi menuju rehabilitasi (Masduki, UNISIA, 2007). Hermawan (Bernas Jogja, 22 Februari 2007) mengatakan bahwa media ibarat kutu loncat yang melompat dari satu isu ke isu lainnya. Hasilnya, pemberitaan bencana tidak pernah tuntas karena terdesak oleh berbagai isu lain yang tidak kalah seksi dan mudah diburu.

Joe Hight dan Cait McMahon (www.dartcenter.org), menandakan kondisi serupa dalam kecenderungan jurnalistik bencana secara global. Dalam bahasa mereka, "*Setelah dua hingga empat minggu, tergantung dari dimensi apa yang terjadi, iring-iringan mulai bergerak. Media menemukan headline-headline baru. Orang dibiarkan menjalani kehidupan mereka sendiri.*"

Greg Philo (Journalist Studies, 2002) mengatakan bahwa kecenderungan pemberitaan yang parsial dan tidak lengkap mengakibatkan minimnya pemahaman audiens tentang kejadian-kejadian yang diberitakan. Dalam kesimpulan Philo, "*That audiences are misinformed because of the low level of explanation and context that is*

given and because some explanations that are present in television reporting are partial and informed by what might be termed “neocolonial” beliefs.”

Dalam hal tema pemberitaan, media berfokus pada pemberitaan traumatik dan dramatik, berisi cerita isak tangis, ekspresi sedih, ataupun nestapa korban, dengan dalih menumbuhkan solidaritas (Masduki, UNISIA, 2007; Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006). Dramatisasi tersebut justru semakin menyeret mentalitas korban bencana menjadi pengemis di kampungnya sendiri, mentalitas pamer para pemberi sumbangan, dan mentalitas masyarakat luas untuk berbelas kasihan, bukan berempati pada korban

Gejala dramatisasi tersebut juga bukan monopoli media-media di Indonesia, namun merupakan gejala global dalam dunia jurnalistik. Dengan meyakinkan, Philo (Journalist Studies, 2002) menandakan, *“This is in part the result of television coverage that tends to focus on dramatic, violent and tragic images while giving very little context or explanation to the events that are being portrayed.”*

Terakhir, dari sisi fase pemberitaan. kritik terpenting adalah absennya peran media dalam masa prabencana sebagai bagian dari *early warning system*. Hal-hal yang menyangkut peringatan dini bencana, cara-cara menyelamatkan diri, justru beredar setelah bencana terjadi.